

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta
2. Putri, Eka Asih. 2014. *Seri Buku Saku-4 Pahami JKN*. CV Komunitas Pejaten Mediatama
3. Dewan Jaminan Sosial Nasional. 2012. Peta Jalan Menuju Jaminan Nasional 2012-2019. Jakarta
4. Finansial. <https://finansial.bisnis.com/read/pemerintah-tambah-44-juta-penerima-bantuan-iuran-bpjs-kesehatan>. Diakses pada tanggal 3 Maret pukul 18.00 WIB
5. Handayani, Asih. Problematika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus Di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul). Uin Sunan Kalijaga. 2017
6. Abu Huraerah. Perlindungan Sosial Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. 2015.
7. Soewando, Prastuti. Timbang Besarnya Manfaat Dari Salah Sasar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 2016.
8. BPJS Kesehatan. Peserta Jaminan Kesehatan. Available From : <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/11>
9. BPJS Kesehatan Cabang Padang. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018.
10. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Barat Tahun 2018.
11. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018.

12. Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman. Rekap Basis Data Terpadu Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018.
13. Mediakom. 2015. *Universal Health Coverage*. Januari. Halaman 11. Jakarta
14. Thabrany, Hasbullah. 2016. *Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta : Rajawali Pers.
15. Kementrian Kesehatan Repunlik Indonesia. 2013. *Buku pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. 2014 *Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan*.
17. Kumpulan Peraturan Jaminan Kesehatan. Availilable From : <http://www.depkes.go.id/resources/download/jkn/himpunan-peraturan-jaminan-kesehatan.pdf>
18. Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta
20. Khoirunnisa, Rizkia. Mengenal Persamaan dan Perbedaan PBI APBN dan PBI APBD. <http://www.pasienbpjs.com/2017/01/persamaan-dan-perbedaan-bpjs-pbi-apbn-vs-apbd.html>. 12April 2019 (14.35)
21. Kementrian Kesehatan RI. Raker Gabungan Bahas Pemutakhiran Dan Verifikasi Data PBI JKN. <http://www.depkes.go.id/article/raker-gabungan-bahas-pemutakhiran-dan-verifikasi-data-pbi-jkn.html>. 13 April (20.33)
22. Mariyanto. 2017. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kartu Indonesia Sehat (Kis) Se-Kabupaten Wonogiri Tahun 2017.

23. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta
24. Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2016 Tentang Penerima Bantuan Iuran. Jakarta
25. Kemendikbud. 2014. SDM Data Verifikasi dan Validasi. Jakarta
26. Surat dari Kementrian Sosial RI Nomor 1392/st/BKS tanggal 15 Desember 2014 perihal Permohonan Data untuk Matching Program KIS,KIP dan KKS
27. Peraturan Pemerintah No 101/ 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI)
28. Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
29. Keputusan Menteri Sosial R.I nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
30. Peraturan Menteri Sosial No. 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
31. Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2015
32. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Basis Fata Terpadu Untuk Perlindungan Sosial. 2013
33. Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
34. Satori, Djam'an. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
35. Muninjaya G. Manajemen Kesehatan. Jakarta: EGC; 2004.
36. Efi Anggriana. Implementasi Model KomuNomor Induk Kependudukan (NIK)asi “Shannon And Weaver”MelaluiPenyebaran Informasi Kartu

IndonesiaSehat–Penerima BantuanIuran(Kis-Pbi) Di Kabupaten Donggala.
2017.

37. Azwar. Azrul. 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta : Bina Rupa Aksara
38. Lofgren Curt TN CN, Anders E,. *People's Willingness to Pay for Health Insurance in Rural Vietnam*. Biomed Central Ltd. 2008:16.
39. Wahyu Kurniawati. *Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN Pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan*. 2018
40. Satori, Djam'an. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
41. Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
42. Rifky Rismawan (2018), dkk. *Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di Era Jaminan Kesehatan Nasional*. 2018
43. Rukmini. *Peran Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran*. 2017
44. Lutfiah. *Ketidaktepatan Sasaran Jaminan Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Kriteria Miskin Pendataan Program Perlindungan sosial*. 2015
45. Muchtar. *Perlindungan Sosial Bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan –Indonesia Sehat (Studi Kasus di Jawa dan Jambi)*. 2014
46. Hermawati. *Pengkajian Konsep dan Indikator kemiskinan*. 2015